



Anaknya Dirundung di SD Swasta, Orang Tua Cari Keadilan ke KPAID

YOGYA, TRIBUN - Dugaan perundungan atau *bullying* terjadi di sebuah sekolah dasar (SD) swasta di Kota Yogyakarta, menimpa siswa berinisial YK. Bahkan, aksi perundungan itu sudah dialaminya sejak di bangku kelas 1.

Ibu korban, K, didampingi penasihat hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, kembali mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Selasa (4/3). Kedatangan mereka ke KPAID merupakan yang kesekian kalinya sejak pihak keluarga melaporkan kasus itu pada 11 dan 14 Oktober 2024 silam.

"Anak saya mengalami kerugian baik fisik dan psikologis, dicemarkan nama baiknya karena dianggap ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), pa-

dahal itu trauma di-bully," kata K.

K menyampaikan kedatangannya ke KPAID Kota Yogyakarta untuk memastikan progres laporannya berjalan sesuai harapan. Sampai kini, ia merasa komisioner KPAID belum cukup memberikan keadilan baginya. "Saya sebagai ibu meminta keadilan yang adil-adilnya, karena ini sudah jelas dari (Disdikpora) ada pem-bully-an yang dibiarkan. Saya minta dikawal, kepala sekolah, wali kelas harus turun (tanggungjawab)," ungkapnya.

Kondisi anaknya saat ini belum stabil dan masih pemulihan trauma. Menurut K, anaknya sempat dipukul, ditendang hingga ditenggelamkan di kolam oleh dua teman sekelasnya, yakni B dan N, yang kini masih bersekolah seperti biasa. Perundungan diketa-

hui kembali terjadi pada 28 Agustus 2024. Salah satu pelaku menendang kaki korban hingga kesakitan dan dirawat di rumah sakit selama empat hari. Dari situ-lah, korban akhirnya berani bercerita bahwa perundungan dialaminya sejak kelas 1 hingga kelas 3.

"Yang saya heran wali kelasnya itu bilang ke anak saya, jangan ada yang melapor. Semenjak kejadian ini, skarang anak saya ikut *home schooling*," terang K.

Penasihat Hukum Korban, Husni Al Amin, menyampaikan kedatangannya ini untuk meminta kejelasan upaya KPAID Kota Yogyakarta, sekaligus menegaskan bahwa korban tidak mengalami ADHD sebagaimana dikabarkan oleh beberapa pihak. Komisioner KPAID Kota Yogyakarta Hari Muryanto, menegaskan pihaknya bertindak atas dasar pemenuhan kepentingan anak-anak yang terlibat.

"Karena kami kan prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan kemudian memuaskan banyak pihak. Menurut kami, ini sudah terpenuhi semuanya," ujarnya.

Di satu sisi, Hari mendukung upaya hukum di lembaga lain apabila pihak keluarga korban menghendaki. Pasalnya dia melihat adanya potensi dugaan pembiaran atau kelalaian yang dilakukan pihak sekolah. **(hda)**



TRIBUN JOGJA/MIFTAHULHUDA

MINTA DUKUNGAN - Orang tua siswa korban perundungan di sebuah SD swasta mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Selasa (4/3).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005